

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Korban Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Majene

Septiawan Ardiputra¹, Burhanuddin²

^{1,2}Prodi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Sulawesi Barat

Email : septiawan.ardiputra@unsulbar.ac.id

Abstrak

Indonesia adalah Negara yang subur, dengan segala kecukupan sumber daya alam yang melimpah dan beragam membuat Indonesia menjadi surga bagi semua biota yang ada di dalamnya. Akan tetapi, dibalik ketersediaan alam yang melimpah tersimpan ancaman tingginya resiko bencana di Indonesia ini disebabkan letak geographis Indonesia menyebabkan banyaknya Gunung Merapi dan relief lapisan bumi yang gampang berubah, Bencana terjadi hampir setiap tahun di Indonesia. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi yang memicu terjadinya tsunami. Bencana Alam kerap terjadi di berbagai wilayah seperti di Kawasan Provinsi Sulawesi Barat. Dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Korban Bencana di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, sehingga fokus dalam penelitian ini adalah pada Implementasi Kebijakan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Deskriptif Kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran secara lengkap tentang objek sosial / kenyataan sosial dengan cara eksplorasi dan klarifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dalam hal implementasi kebijakan pemerintah terkait penanggulangan korban bencana gempa, belum berjalan dengan baik/efektif. Hal ini dilihat dari 4 indikator yang dikemukakan oleh George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi yang belum berjalan dengan baik dan efektif.

Kata Kunci : *Implementasi, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi*

Abstract

Indonesia is a fertile country, with all the adequacy of abundant and diverse natural resources, making Indonesia a paradise for all the biota in it. However, behind the abundant availability of nature, there is a high threat of disaster risk in Indonesia. This is due to the geographical location of Indonesia which causes the number of Mount Merapi and the relief of the earth's layers to change easily. Disasters occur almost every year in Indonesia. Earthquakes are usually caused by the movement of the earth's crust or plates that triggers a tsunami. Natural disasters often occur in various areas such as in the Province of West Sulawesi. And the formulation of the problem in this study is how to implement government policies in disaster victim management in Ulumanda sub-district, Majene district, so the focus in this research is on policy implementation. The research method used in this research is descriptive qualitative which aims to provide a complete picture of social objects / social reality by way of exploration and clarification. The results of the study indicate that in Ulumanda District, Majene Regency, in terms of implementing government policies related to earthquake disaster management, it has not been running well/effectively. This can be seen from the 4 indicators put forward by George Edward III, namely communication, resources, disposition or attitude, and the bureaucratic structure that has not been running well and effectively.

Keywords : *Implementation, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang subur, dengan segala kecukupan sumber daya alam yang melimpah dan beragam membuat Indonesia menjadi surga bagi semua biota yang ada di dalamnya. Akan tetapi, dibalik ketersediaan alam yang melimpah tersimpan ancaman tingginya resiko bencana di Indonesia ini disebabkan letak geographis Indonesia menyebabkan banyaknya Gunung Merapi dan relief lapisan bumi yang gampang berubah, Bencana terjadi hampir setiap tahun di Indonesia. Bencana alam tentunya memberikan dampak dan kerugian yang cukup besar yang semua itu menyimpan potensi ancaman dari alam bagi masyarakat Indonesia. Ancaman itu, bisa jadi berupa gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Bencana alam, merupakan suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Terkhusus pada Peristiwa alam berupa gempa bumi/tsunami.

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi yang memicu terjadinya tsunami. Bencana Alam kerap terjadi di berbagai wilayah seperti di Kawasan Provinsi Sulawesi Barat dimana provinsi Sulawesi barat memiliki catatan sejarah yang buruk atas peristiwa Gempa Bumi disertakan bencana Tsunami. Dalam catatan bmkgs telah menyebutkan bahwa pada tahun 1967 dan 1969 pernah terjadi tsunami. Menurut Ka. BMKG Daryono bahwa pada tanggal 23 februari 1969 gempa dengan kekuatan 6,9 sr dan kedalaman 13 km pernah terjadi di majene. Gempa bumi 1969 tersebut menimbulkan gelombang tsunami dan puluhan orang tewas. Waktu itu di pellatoang dan pasarangan terjadi tsunami setinggi 4 meter lalu tsunami 1,5 meter di pailipi. (Widianto, 2021). Sehingga menyebabkan kerugian baik moril maupun materil di tengah-tengah masyarakat, menyebabkan degradasi mental masyarakat, gangguan psikis dan jatuhnya korban jiwa.

Pada pasal 5 Undang-Undang no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana ditingkat Nasional. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana di daerah.

Gempa Bumi Kembali terjadi dengan Pengulangan yang sama Pada tanggal 14 januari 2021 pukul 14:35 WITA Majene, Sulawesi Barat dan sekitarnya Kembali diguncang oleh gempa bumi dengan magnitudo 5,9. Gempa bumi ini disusul oleh gempa bumi lebih besar yang berkisar 6,2 M yang melanda pesisir barat Pulau Sulawesi, Pusat gempa berada di 7 km timur laut Majene. Guncangan gempa bumi dirasakan di sebagian besar bagian barat Pulau Sulawesi hingga pantai timur Kalimantan. 13 jam kemudian. BMKG menyatakan bahwa gempa bumi pertama berepisenter pada koordinat 118.89oBT dan 2.99oLS, sementara gempa bumi kedua berpusat di 118.94oBT dan 2.98oLS dengan kedalaman episenter masing-masing 18 Km. Sebagian besar daerah yang ada di Sulawesi barat merasakan gempa tersebut Terkhususnya dikabupaten majene di desa salutambung kec.ulumanda yang terdampak mereka juga sangat merasakan gempa tersebut Pada tanggal 14 januari 2021 pukul 14:35 WITA gempa dengan magnitudo 5,9 dan disusul gempa yang lebih besar 6,2 M.

Masyarakat yang ada Kecamatan Ulumanda sangat panik saat terjadinya gempa , dimana hampir semua rumah warga ataupun sekolah, perkantoran, mengalami kerusakan Adapun masyarakat mengalami luka-luka ringan dan parah akibat reruntuhan rumah yang menimpah mereka dan masyarakat secepatnya mengungsi ketempat yang lebih Aman membangun posko darurat sementara. Sembari menunggu pihak dari pemerintah kab.majene untuk datang membantu masyarakat yang terdampak gempa didesa salutambung. Pada kenyataannya perhatian pemerintahan kab. Majene BPBD dalam penanggulangan korban bencana gempa didesa salutambung masih kurang bagi masyarakat baik itu pada saat Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan pasca bencana. Berdasarkan latar

belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat Judul Penelitian yaitu " Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Korban Bencana di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Korban Bencana di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, sehingga fokus dalam penelitian ini adalah pada Implementasi Kebijakan.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Deskriptif Kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran secara lengkap tentang objek sosial / kenyataan sosial dengan cara eksplorasi dan klarifikasi. Menurut Nazir dalam (Santosa, 2015) bahwa suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang, status kelompok manusia dan suatu subjek dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dengan menjelaskan seperangkat proses dan juga bersifat kontradiktif untuk menyimpan suatu informasi mengenai subjek penelitian. Menggambarkan suatu keadaan apa adanya tanpa melakukan manipulasi pada suatu variabel yang diteliti dan juga cara mendapatkan informasi yang apa adanya merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi sedangkan dalam hal penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang penentuannya didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini atau Teknik pengambilan sampel yang tidak berdasarkan aturan (random), daerah, ataupun strata (Kurniawan, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menganalisis sesuai dengan kondisi lapangan dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan korban bencana gempa yaitu dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George Edward III dimana menurut pandangan dari George Edward III agar dapat mengetahui implementasi kebijakan berjalan dengan efektif maka perlu memperhatikan 4 isu pokok implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan struktur Birokrasi. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam penelitian ini kajian implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan korban bencana gempa didesa salutambung kec.ulumanda kab.majene dapat kita tinjau dengan cara melihat bagaimana cara pemerintah kab.majene mencapai tujuan dari kebijakan penanggulangan bencana tersebut .hal itu dapat dilihat melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak penyelenggara penanggulangan bencana di Kecamatan Ulumanda yang dalam hal ini adalah BPBD Kab.Majene.

Untuk mengukur implementasi kebijakan disuatu daerah apa terlaksana dengan baik sudah berjalan dengan efektif atau tidak efektif maka perlu dilihat dari implementasi kebijakan pemerintah kab.majene BPBD dalam penanggulangan korban bencana gempa Kec. Ulumanda Kab. Majene dapat terlaksana dengan baik jika memperhatikan variable yang mempengaruhi keefektifan implementasi kebijakan seperti yang dijelaskan oleh George Edward III ada 4 indikator : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birorasi. Berikut adalah uraian penjelasan Hasil penelitian penulis dengan menggunakan 4 indikator dari George Edward III :

Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud disini mengenai kebijakan pemerintah dalam penanggulangan korban bencana gempa di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene yaitu bagaimana komunikasi BPBD Kabupaten Majene dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana gempa terkhususnya kepada pemerintahan desa dan masyarakat salutambung. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi untuk

mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan korban bencana gempa di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene mengenai penginformasian, sosialisasi simulasi mengenai materi-materi kebencanaan itu dapat dikatakan masih kurang perhatian bagi pemerintah komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu masih belum terealisasi dengan baik. Akan tetapi koordinasi atau komunikasi BPBD Kabupaten Majene, pihak OPD ataupun Lembaga serta dan Pemerintahan Kecamatan itu sudah terjalin dengan baik kordinasinya dalam membantu masyarakat salutambung pada saat setelah terjadinya gempa.

Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud disini mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Majene melalui BPBD Kabupaten Majene dalam penanggulangan korban bencana gempa di desa salutambung kecamatan ulumanda seperti sarana dan prasaran, fasilitas, anggaran, SDM, dan menghilangkan trauma ketakutan masarakat dalam membantu menanggulangi korban bencana yang terdampak gempa. Dapat dilihat dari penjelasan beberapa informan bahwa dalam hal implementasikan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana gempa di Kecamatan Ulumanda dapat kita simpulkan bahwa sumber daya sarana dan prasarana, bantuan SDM, bantuan logistic , anggaran, perbaikan rumah oleh pihak Pemerintah Kabupaten Majene dalam membantu menanggulangi korban bencana gempa dinilai masih kurang mencukupi dan belum terealisasi semua kepada masyarakat, adanya pihak ketiga dari luar sehingga cukup dapat terpenuhi di Kecamatan Ulumanda. Pihak ketiga sangat berperan penting dalam penanggulangan bencana gempa di Kecamatan Ulumanda.

Disposisi

Disposisi atau sikap yang dimaksud disini adalah bagaimana sikap dari Pemerintah Kabupaten Majene, BPBD, Tim Satgas Bencana dan Tim Relawan dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan korban bencana di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Dapat dilihat dari hasil penelitian lapangan bahwa penanggulangan bencana gempa di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dapat kita simpulkan bahwa disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan seperti Pemerintah Kabupaten Majene, BPBD, Tim Satgas Bencana dan Tim Relawan, sudah berjalan dengan baik dan sangat membantu masyarakat korban bencana gempa rasa tanggung jawab yang kuat, motivasi yang kuat, komitmen yang dibangun dalam diri masing-masing pihak sudah terlihat oleh masyarakat, dalam membantu korban bencana gempa Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene yang dinilai sudah sangat baik.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang dimaksud disini pada implementasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Majene melalui BPBD dalam penanggulangan bencana bagaimna hubungan antar pihak implementor, Lembaga, OPD dll dan juga yang dimaksud disini yaitu SOP yang ada di Pemerintah Kabupaten Majene. Dilihat dari penjelasan beberapa informan bahwa dalam hal penanggulangan bencana gempa Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dapat kita simpulkan bahwa struktur birokrasi menyangkut hubungan dari Pemerintah Kabupaten Majene dengan pihak-phak yang turut membantu dalam penanggulangan bencana ataupun hubungan dengan pihak pemerintah setempat dan masyarakat itu sudah cukup terjalin dengan baik. Menyangkut masalah pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian bantuan itu masih belum terealisasi dengan baik, belum merata pembagiannya ke masyarakat setempat.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dalam hal implementasi kebijakan pemerintah terkait penanggulangan korban bencana gempa, belum berjalan dengan baik/efektif. Hal ini dilihat dari 4 indikator yang dikemukakan oleh George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

Dimulai dari Komunikasi, dinilai masih terdapat hambatan kurangnya komunikasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majene ataupun instansi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menyampaikan kejelasan

informasi sebelum terjadinya suatu bencana itu masih minim akan tahanan masyarakat.

Sumber Daya, dinilai masih minim sarana dan prasarana, baik dari fasilitas, anggaran, SDM, dan melakukan trauma healing oleh pihak BPBD Kabupaten Majene itu dinilai masih belum tercukupi kepada masyarakat setempat. Sehingga setiap Tindakan penanggulangan bencana masih bergantung sepenuhnya dengan OPD dan instansi terkait yang bergerak dibidangnya.

Disposisi atau sikap, para pihak BPBD dinilai sudah berjalan dengan baik dilihat dari kerja sama yang dilakukan oleh pihak BPBD dengan Pemerintah Desa setempat ataupun masyarakat.

Struktur birokrasi, dinilai pihak BPBD dengan pihak OPD ataupun instansi Kabupaten Majene selalu terjalin hubungan kordinasi dengan baik demi kelancaran penanggulangan bencana gempa di Kabupaten Majene. Dan terkait dengan standar operational prosedur (SOP) di pemerintah Kabupaten Majene BPBD itu belum terdapat SOP. Sehingga mereka masih berpatokan ke pusat BNPB dan aturan Perda Kabupaten Majene. Tidak adanya SOP BPBD itu dikarenakan kurangnya anggaran yang masuk sehingga untuk membuat SOP di BPBD Kabupaten Majene terkendala.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Agriawan (2019) dalam skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penanganan Gema Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang". Skripsi Universitas Tadulako, Palu.
- Febi Leofano (2013) dalam skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Padang". Skripsi Universitas Andalas, kota padang.
- Dody Setyawan (2019) Dalam skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program SMART di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu". Skripsi Universitas Tribhuwana Tunggaladewi.

Internet Website

- Koko Wijayanto, "Pencegahan dan Manajemen Bencana", 2012, (<http://social-studies17.blogspot.com/2012/11/recognize-pencegahan-bencana-dan.html>).
- Widianto, W. (2021). Gempa di Sulawesi Barat. Catatan Sejarah Gempa Di Sulawesi Barat: Terjadi 1967,1969 Dan 1984, Dua Kali Diterjang Tsunami. <https://www.tribunnews.com/regional/2021/01/15/catatan-sejarah-gempa-di-sulawesi-barat-terjadi-19671969-dan-1984-dua-kali-diterjang-tsunami?page=2>
- <https://daerah.sindonews.com/read/302290/174/bmkg-paparkan-sejarah-gempa-dahsyat-di-majene-dan-mamuju-sulawesi-barat-1610690502>

Book

- Abdul Wahab Solihin 2008. Analisis kebijakan dan Formulasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikanto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka.
- A.W. Coburn, dkk. 1994. Mitigasi Bencana Edisi 2. UNDP
- Budi Winarno. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo
- Effendi, Sofian, 1989, Alternatif Kebijaksanaan Perencanaan Administrasi:
- Islamy Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Joko Widodo, 2001. Analisis Kebijakan Publik. Malang Bayumedia Publishing
- Leo Agustino, 2008 Dasar-dasar kebijakan publik, Cet. /Bandung: CV. Alfabeta
- Muchsin dan Fadillah Putra, 2003. Hukum Dan Kebijakan Publik, Malang: Averroes Press.
- Mirriam Budiardjo, 2006. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho, Riant, 2008. Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo
- Samudra Wibawa. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta. Rajawali Press.
- Subarsono, AG. 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiono.2006. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Saebani, Beni Ahmad. Metode Penelitian. Bandung: Pustaka setia, 2008.
- Sanapian, Faisol. (1999). Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Aplikasi. Malang: IKIP.

Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2008. Tentang Penyelenggara
Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No 2 Tahun 2010. Tentang Penyelenggara Penanggulangan
Bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Majene No 9 Tahun 2019. Tentang Penyelenggara Penanggulangan
Bencana